

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2022

(CALK, NERACA, LPE, LRA,LO)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi diatas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya;
2. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksudkan poin (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang di kelolanya;
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai, sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Laporan Keuangan SKPD bahwa pengendalian APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Sistem Akuntansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Realiasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan/menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan

Periklanan Kabupaten Jembrana yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Pendapatan:

Anggaran	Rp	10,861,000,000.00
Realisasi	Rp	5.891.676.250,50
Selisih kurang dari anggaran	Rp	<u>(4.969.323.749,50)</u>
Atau		54,25 %

Belanja:

Anggaran	Rp	26.832.956.031.00
Realisasi	Rp	24.461.691.331,67
Selisih kurang dari anggaran	Rp	<u>(2.371.264.699,33)</u>
atau		91,16 %

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dalam periode tanggal 31 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	6.250.312.002,00
Beban	Rp	<u>24.595.535.836,88</u>
Surplus/Defisit	Rp	(18.345.223.834,88)

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana mengenai Aset. Kewajiban. dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut :

Aset Lancar	Rp	1.525.301.112,62
Aset Tetap	Rp	61.864.012.625,78
Aset Lainnya	Rp	<u>1.119.867.876,00</u>
Kewajiban Merupakan Kewajiban Jangka Pendek	Rp	00
Ekuitas	Rp	<u>64.509.181.613,90</u>

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut :

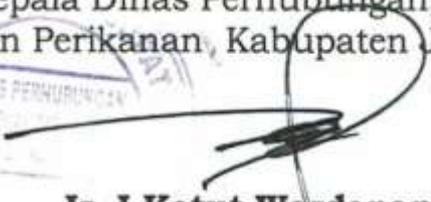
Ekuitas awal	Rp	68.438.681.367,61
Surplus Laporan Operasional	Rp	(18.345.223.834,88)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	Rp	(4.154.291.000,00)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp	18.570.015.081,17
Ekuitas Akhir	Rp	64.509.181.613,90

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Operasional. Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian laporan keuangan ini dibuat semoga merupakan penjabaran dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana.

Negara, 31 Desember tahun 2022

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan
dan Perikanan, Kabupaten Jemberana,

Ir. I Ketut Wardananaya
Pembina Tk I
NIP. 19651229 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kompleks Civic Center, Jalan Mayor Sugianyar No 9 . , Negara 82218
Telp / Fax. (0365) 4545136 / 4545137

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Negara, 31 Desember tahun 2022

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan
dan Perikanan, Kabupaten Jemberana,



Ir. I Ketut Wardananaya
Pembina Tk I
NIP. 19651229 199203 1 011

Halaman

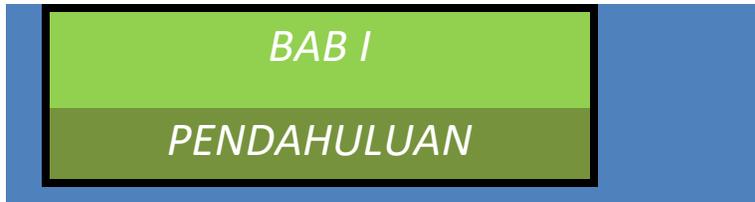
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ...	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ..	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.2 Kebijakan Keuangan	9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	18
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .	18
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	41
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	44
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ..	44
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	45
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	46
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	46
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.....	54
5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	54
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	54
5.1.2 Belanja	63
5.2 Pos-pos Laporan Operasional	113
5.2.1 Pendapatan –LO	113
5.2.2 Beban	115
5.3 Pos-pos Neraca	125
5.3.1 Aset	125
5.3.2 Kewajiban	132
5.3.3 Ekuitas	133
5.4 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi/ entitas Pelaporan yang Menggunakan Basi Akrual Rekomendasi.....	133

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 135

BAB VII PENUTUP 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **Maksud**



dan Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan perangkat daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan

realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - c. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, tanggal 2 Februari 2021);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kab. Jembrana Tahun 2021 Nomor 6) Ditetapkan dan diundangkan di Negara tanggal 30 Desember 2021

- q. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana;

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan Catatan Atas laporan keuangan Tahun 2021 terdiri dari

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Kinerja

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana

- 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan – LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2 Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan LO

5.2.2. Beban

5.3 Pos-pos Neraca

5.3.1 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.3 Ekuitas

5.4 Pengungkapan atas Pos – Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis AkruaI

Bab VI : Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Kabupaten Jembrana yang berada di bagian barat Pulau Bali memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang subur, serta pantai yang membentang dari Gilimanuk sampai dengan Pekutatan masih memiliki corak pertanian sebagai sektor basis perekonomian yang sedikit berbeda dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali khususnya Bali selatan yang mengandalkan perekonomian yang didukung oleh kebudayaan dan kesenian serta panorama dan keindahan alam yang menjadi daya tarik pariwisata. Serta menjadi *sentra produksi perikanan* yang terpadu dan terintegrasi dengan sasaran Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan dan peningkatan teknologi SDM, SDA perikanan. Begitu pula didukung dengan *perekonomian transportasi* di bidang perhubungan yang handal dan terpadu. Berbicara indikator ekonomi Kabupaten Jembrana tidak terlepas dari capaian kinerja makro Ekonomi Kabupaten Jembrana diukur dengan menggunakan produk domestik bruto berdasarkan harga berlaku dan konstan, pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita. Capaian kinerja makro ekonomi Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

A. Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana atas dasar Harga Konstan sebagai tolak ukur Pertumbuhan ekonomi Jembrana mengalami akselerasi atau pertumbuhan positif yang salah satu disebabkan dari kontribusi sektor perikanan sebagai sektor produksi, dimana tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya/2020 sebesar 5,604,964 ton, capaian produksi perikanan tahun 2021 (21,221,743 ton) menurun 20,89% dibandingkan tahun 2020 (26,826,707 ton).

B. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (2010-2018) dengan trend laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85% pada tahun 2018 laju pertumbuhan

ekonomi mengalami akselerasi atau pertumbuhan positif sebesar 0,30% dari tahun 2017 sebesar 5,29% menjadi 5,59% pada tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,19% dimana meningkat sebesar 0,14% dari tahun 2014 yang mencapai 6,05%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana di tahun ini lebih rendah dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 6,34% dan berada diatas rata-rata pertumbuhan Ekonomi Nasional yang mencapai 5,06 persen.

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jembrana Tahun 2022 dari **sektor transportasi** dan **sektor penyediaan akomodasi** memberikan kontribusi 47,90% Capaian Persentase cakupan peningkatan pelayanan angkutan dan 32,28% Persentase cakupan peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ serta Persentase kendaraan laik jalan sebesar 39,97%.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun 2022 telah disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Sampai dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022, perubahan anggaran dilaksanakan dua kali yaitu perubahan mendahului perubahan dengan perubahan rincian nomenklatur anggaran dan perubahan/pergeseran anggaran. Alokasi anggaran dari DPA induk, DPA Perubahan Pergeseran Anggaran dengan rincian :

1. DPA induk Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 10.361.000.000,00, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 23.661.145.021 yaitu belanja operasi Rp. 22.430.280.021 dan belanja modal sebesar Rp.1.230.865.000 dengan rincian sbb :

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode	Uraian		Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp10.361.000.000
4 1	02	Retribusi Daerah	Rp10.311.000.000
4 1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp50.000.000
		Jumlah Pendapatan	Rp10.361.000.000
5		BELANJA DAERAH	
5 1		BELANJA OPERASI	Rp22.430.280.021
5 1	01	Belanja Pegawai	Rp7.154.852.583
5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.640.878.419
5 1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp1.634.549.019
5 2		BELANJA MODAL	Rp1.230.865.000
5 2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp86.593.000
5 2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.071.000.000
5 2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp73.272.000
		Jumlah Belanja	Rp23.661.145.021
		Total Surplus/(Defisit)	(Rp13.300.145.021)

2. DPA Perubahan Tahun 2022 penjabarannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 10.861.000.000, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 26.832.956.031 yaitu belanja Operasi Rp. 25.883.303.031 dan belanja modal sebesar Rp. 949.653.000 dengan rincian sbb :

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp10.861.000.000
4 1	02	Retribusi Daerah	Rp10.811.000.000
4 1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp50.000.000
		Jumlah Pendapatan	Rp10.861.000.000
5		BELANJA DAERAH	
5 1		BELANJA OPERASI	Rp25.883.303.031
5 1	01	Belanja Pegawai	Rp6.517.516.693
5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.865.737.319
5 1	05	Belanja Hibah	Rp50.000.000
5 1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp2.450.049.019
5 2		BELANJA MODAL	Rp949.653.000
5 2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp300.488.000
5 2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp632.000.000
5 2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp17.165.000
		Jumlah Belanja	Rp26.832.956.031
		Total	(Rp15.971.956.031)

2.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah

Indikator pencapaian kinerja Keuangan pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra), Renja Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, dimana untuk masing-masing program dan kegiatan telah diuraikan sasaran dan indikator capaian program, tolok ukur kinerja serta target yang ingin dicapai dalam periode anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 mencapai sebesar **Rp 24.461.691.331,67 atau 91,16%** dari anggaran belanja operasi dan belanja modal yang dialokasikan sebesar **Rp 26,832,956,031.00** Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pencapaian keuangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp. 5.891.676.250,50 atau (54,25%) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 10,861,000,000.00, terdiri dari:

- 1) Retribusi Daerah pencapaian realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 5.793.343.691,50 tercapai 4,24% dari anggaran yang disediakan Rp. 10,811,000,000.00
- 2) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 98.332.559 tercapai diatas 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00

b. Belanja Daerah

Realisasi pencapaian keuangan dari Belanja Daerah sebesar Rp. 24.461.691.331,67 atau (91,16%) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 26.832.956.031,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi realisasi tercapai sebesar Rp 23.531.919.450,55 atau sebesar 90,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 25.883.303.031,00

a. Belanja Pegawai	Rp.	5.877.178.020,00
b. Belanja Barang	Rp.	15.921.948.188,29
c. Belanja Hibah	Rp.	30.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.702.793.242,26

2) Belanja Modal pencapaian realisasi sebesar Rp 929.771.881,12 atau sebesar 97,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 949.653.000,00

a. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	294.596.100,00
b. Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.	618.240.781,12
c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	00
d. Belanja Aset Lainnya	Rp.	16.935.000,00

**Perbandingan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022-2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
PENDAPATAN	10.861.000.000,00	5.891.676.250,50	54,25	5.512.755.312,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.861.000.000,00	5.891.676.250,50	54,25	5.512.755.312,00
Pendapatan Retribusi Daerah	10.811.000.000,00	5.793.343.691,50	53,59	5.451.609.268,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	98.332.559,00	196,67	61.146.044,00
BELANJA	26.832.956.031,00	24.461.691.331,67	91,16	25.369.031.610,77
BELANJA OPERASI	25.883.303.031,00	23.531.919.450,55	90,92	23.182.114.321,89
Belanja Pegawai	6.517.516.693,00	5.877.178.020,00	90,18	5.806.002.608,11
Belanja Barang	16.865.737.319,00	15.921.948.188,29	94,40	15.011.557.113,01
Belanja Hibah	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	2.450.049.019,00	1.702.793.242,26	69,50	2.364.554.600,77
BELANJA MODAL	949.653.000,00	929.771.881,12	97,91	2.186.917.288,88
Belanja Peralatan dan Mesin	300.488.000,00	294.596.100,00	98,04	1.821.507.314,08
Belanja Bangunan dan Gedung	632.000.000,00	618.240.781,12	97,82	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0	365.409.974,80
Belanja Aset Lainnya	17.165.000,00	16.935.000,00	98,66	0,00
SURPLUS / DEFISIT	(15.971.956.031,00)	(18.570.015.081,17)	0	(19.856.276.298,77)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(15.971.956.031,00)	(18.570.015.081,17)	0	(19.856.276.298,77)

2.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

2.4.1 Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah telah rata-rata mencapai diatas 80% dari target yang ditetapkan, namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan hal ini antara lain :

1. dari lain-lain PAD berupa Kontrak Bengkel Perikanan dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 dan Sewa Kapal Perikanan sebesar Rp. 45.000.000,00 belum ada realisasi. Dikarenakan tidak ada perjanjian kontrak di tahun 2022.

Beberapa strategi dan prioritas yang perlu dilakukan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk memperbaiki sistem pemungutan retribusi daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Meningkatkan ketaatan wajib retribusi dan pembayaran retribusi daerah;
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

2.4.2 Belanja Daerah

Sampai dengan periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun 2022, dapat diidentifikasi hambatan dan kendala dalam pengelolaan keuangan dinas, dilihat dari penyerapan anggaran dibawah 85%, dimana penyerapan realisasi pada 6 program, 17 kegiatan dan 34 sub kegiatan, ada beberapa yang penyerapannya masih dibawah 85% antara lain dapat dilihat pada table berikut ini :

Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dibawah 85 %

SKPD : Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana

No.	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan Ketidackapaian Serapan Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,528,100.00	5,921,550.00	69.44	Realisasi sesuai kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan
2.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269,140,000.00	161,822,838.00	60.13	Karena sesuai surat perintah tugas yang ditunjuk melakukan dinas luar provinsi dengan rincian adalah uang penginapan es IV dan uang penyebrangan pada belanja perjalanan dinas biasa dan penginapan golongan II/non PNS untuk belanja perjalanan dinas paket meeting luar provinsi golongan II/non PNS. Dikarenakan sesuai kebutuhan rapat rapat koordinasi yang dilaksanakan dan adanya kesalahan perhitungan volume rincian perjalanan dinas
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,450,000.00	3,955,000.00	19.34	Realisasi sesuai kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	541,791,000.00	201,613,870.00	37.21	Adanya efesiensi dari harga penawaran satuan harga sewa kendaraan
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	4,199,500.00	3,461,400.00	82.42	Pada Belanja Penggandaan terjadi perbedaan harga satuan antara standar harga pada SIPD dan harga riil. Dan pada Belanja Bantuan Sosial Barang terjadi Refocusing Anggaran
6.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1,836,991,000.00	1,418,081,095.86	77.20	Pada Belanja Bantuan Sosial Barang, sebagian nelayan sudah mendapatkan bantuan , berupa BLT, PKH dan bantuan lainnya yang sejenis

7.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	912,618,200.00	739,308,957.07	81.01	Pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit ikan belum bisa direalisasikan karena Kolam Ikan pada Gedung Kesenian Bung Karno belum direnovasi
8	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82,039,319.00	61,349,076.40	74.78	Pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, bantuan ditolak oleh kelompok karena sebagian pengurus sudah tidak aktif

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah OPD dapat didefinisikan sebagai berikut :
Satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan untuk menyajikan informasi posisi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Entitas akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Jembrana yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggungjawabnya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah selaku SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. PPKD selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dari seluruh SKPD selaku entitas akuntansi.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. **Basis kas** untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

2. **Basis akrual** untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyajian laporan keuangan Dinas perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana berdasarkan pada kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang agar dapat dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan basis nilai perolehan historis dengan mata uang rupiah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan.

3.4 **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana mengacu pada kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, antara lain::

1. Kas

Kas di bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang melalui **mekanisme transaksi non tunai** melalui Aplikasi elektronik Bank Pembangunan Daerah Bali.

Guna terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah/Kota, Pemerintah Kabupaten, pada awal tahun anggaran 2018 masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan pembayaran dengan penyelenggaraan transfer dana dengan **system electronic banking/transaksi non tunai**, dimana Bendahara Pengeluaran OPD kemudian membatasi bahkan tidak perlu lg melakukan pergeseran uang dari bank ke kas tunai.

Transaksi non tunai itu meliputi seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa melalui Sistem E-Transaksi Non Tunai, wajib retribusi dan lain2 PAD melakukan pembayaran ke Bank Oprasional yang ditentukan yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara.

2. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik, kecuali persediaan obat-obatan menggunakan pencatatan dengan Metode Perpetual. Untuk penilaian persediaan menggunakan metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama). Persediaan selain obat-obatan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan yang akan diterima, dinilai sebesar nominalnya yang akan diterima dalam satu periode akuntansi berikutnya.

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang.

5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonomisnya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan

- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SE Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun anggaran 2022 pada DPA Induk sebesar **Rp. 10.361.000.000,00** dan pada DPA Perubahan **Rp. 10.861.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.891.676.250,50** atau **54,25%**, kekurangan pencapaian target sebesar **Rp. (4.969.323.749,5000)** atau **45,75 %** dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana meliputi Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai pembanding realisasi tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 4.1.1.1 Realisasi Pendapatan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Retribusi Daerah	10,811,000,000.00	5,793,343,691.50	53.59	5,451,609,268.00
Terdiri dari:				
Retribusi Pelayanan Parkir di - Tepi Jalan Umum	5,000,000,000.00	2,017,897,950.00	40.36	2,068,578,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan - Bermotor	650,000,000.00	338,957,600.00	52.15	-
- Retribusi Tempat Pelelangan	2,366,240,000.00	1,525,505,466.50	64.47	1,834,694,068.00
- Retribusi Terminal	2,680,000,000.00	1,781,881,000.00	66.49	1,406,010,000.00
Retribusi Penjualan Produksi - Usaha Daerah	104,000,000.00	123,703,000.00	118.95	118,080,000.00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan - Angkutan Umum	2,760,000.00	1,510,000.00	54.71	630,000.00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	8,000,000.00	3,888,675.00	48.61	23,617,200.00
Lain-lain PAD yang sah	50,000,000.00	-	-	-
Terdiri dari:				
- Hasil Sewa BMD	50,000,000.00	-	-	-
- Hasil Kerja Sama Daerah	-	98,332,559.00	100.00	61,146,044.00
Total Pendapatan Asli Daerah	10,861,000,000.00	5,793,343,691.50	53.34	5,451,609,268.00

Analisis table 4.1.1 menunjukkan bahwa realisasi PAD pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana tahun 2022 pencapaian dibawah 85%, hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan meningkat dari kondisi riil PAD. Hal ini tentunya memerlukan analisis yang tepat dalam memproyeksikan rencana target di tahun yang akan datang. Namun dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi PAD mengalami peningkatan.

Berikut dapat kami sajikan rincian target dan capaian realisasi tahun 2022.

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JEMBRANA

UNTUK PERIODE PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022

	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	TARGET PERUBAHAN	BULAN INI	BULAN LALU	REALISASI S/D.BLN. INI	%	(LEBIH / KURANG)	KET
-	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,361,000,000.00	10,861,000,000.00	654,796,842.00	5,236,909,408.50	5,891,706,250.50	54.25	(4,469,293,749.50)	
-	-				-				
-	<u>RETRIBUSI DAERAH</u>	10,311,000,000.00	10,811,000,000.00	570,464,283.00	5,222,909,408.50	5,793,373,691.50	53.59	(4,517,626,308.50)	
-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	197,527,950.00	1,820,370,000.00	2,017,897,950.00	40.36	(2,982,102,050.00)	
-	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	197,527,950.00	1,820,370,000.00	2,017,897,950.00	40.36	(2,982,102,050.00)	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650,000,000.00	650,000,000.00	22,573,810.00	316,413,790.00	338,987,600.00	52.15	(311,012,400.00)	
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	650,000,000.00	650,000,000.00	22,573,810.00	316,413,790.00	338,987,600.00	52.15	(311,012,400.00)	
					-				
	Retribusi Tempat Pelelangan	1,866,240,000.00	2,366,240,000.00	142,802,523.00	1,382,702,943.50	1,525,505,466.50	64.47	(840,734,533.50)	
-	Retribusi Tempat								

	Pelelangan Ikan (TPI)	1,866,240,000.00	2,366,240,000.00	142,802,523.00	1,382,702,943.50	1,525,505,466.50	64.47	(840,734,533.50)	
					-				
	Retribusi Terminal				-				
-	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2,680,000,000.00	2,680,000,000.00	172,672,000.00	1,609,209,000.00	1,781,881,000.00	66.49	(898,119,000.00)	
-	Terminal Cargo Jembrana	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-	(18,000,000.00)	
-	Terminal Cargo Gilimanuk	5,000,000.00	5,000,000.00	1,155,000.00	6,910,000.00	8,065,000.00	161.30	3,065,000.00	
-	Terminal Cargo Negara	17,000,000.00	17,000,000.00	1,515,000.00	16,135,000.00	17,650,000.00	103.82	650,000.00	
-	Terminal Manuver Gilimanuk	2,484,332,000.00	2,484,332,000.00	162,635,000.00	1,535,994,000.00	1,698,629,000.00	68.37	(785,703,000.00)	
-	Retribusi Terminal Gilimanuk	100,000,000.00	100,000,000.00	7,367,000.00	50,170,000.00	57,537,000.00	57.54	(42,463,000.00)	
-	Retribusi Terminal Negara	55,668,000.00	55,668,000.00	-	-	-	-	(55,668,000.00)	
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	104,000,000.00	104,000,000.00	34,738,000.00	88,965,000.00	123,703,000.00	118.95	19,703,000.00	
-	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak (Produksi Balai Benih Ikan (BBI) Tegak Gede)	104,000,000.00	104,000,000.00	34,738,000.00	88,165,000.00	122,903,000.00	118.18	18,903,000.00	
					-				

	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2,760,000.00	2,760,000.00	150,000.00	1,360,000.00	1,510,000.00	54.71	(1,250,000.00)	
-	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2,760,000.00	2,760,000.00	150,000.00	1,360,000.00	1,510,000.00	54.71	(1,250,000.00)	
					-				
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	8,000,000.00	8,000,000.00	-	3,888,675.00	3,888,675.00	48.61	(4,111,325.00)	
-	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan (Budidaya Perikanan)	8,000,000.00	8,000,000.00	-	3,888,675.00	3,888,675.00	48.61	(4,111,325.00)	
					-				
	Lain-lain PAD yang Sah	50,000,000.00	50,000,000.00	84,332,559.00	14,000,000.00	98,332,559.00	196.67	48,332,559.00	
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-			
	Hasil Penjualan Hewan	-	-	-	-	-			
	SP3 Lainnya dari Hasil penjualan aset induk-induk ikan yang diafkir BBI Tegak Gede	-	-	-	-	-			
	Hasil Sewa BMD	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	50.00	(25,000,000.00)	
-	Hasil Sewa BMD	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	50.00	(25,000,000.00)	

-	Kontrak Bengkel Perikanan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	(5,000,000.00)	
-	Kontrak Kapal Perikanan	45,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	55.56	(20,000,000.00)
	Hasil Kerja Sama Daerah				14,000,000.00	14,000,000.00		
-	SP3 Lainnya dari Perusahaan Kerang Mutiara	-	-	59,332,559.00	-	59,332,559.00		
-	SP3 Lainnya dari Penggunaan Areal Parkir di Tepi Jalan Umum dan Areal Terminal	-	-	-	14,000,000.00	14,000,000.00		

Sumber : Sub.Bagian Keuangan Sekretariat DPKP Tahun 2022

Dari pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah masih belum signifikan pencapaiannya dan masih terdapat piutang retribusi dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan sampai dg periode yang berakhir 31 Desember tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1,569,877,067.00** dengan rincian sbb :

- Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2013 sebesar **Rp. 00** dari tunggakan sebesar **Rp. 14,498,230.00**, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar Rp. **14,498,230.00**.
- Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2014 sebesar **Rp.00** dari tunggakan sebesar **Rp. 5,055,855.00**, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar Rp. **5,055,855.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2014 sebesar **Rp.00** dari tunggakan sebesar **Rp. 730,298.00**, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar Rp. **730,298.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2015 sebesar **Rp .00** dari tunggakan sebesar **Rp. 14,773,484.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 14,773,484.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2015 sebesar **Rp. 00** dari tunggakan sebesar **Rp. 1,255,990.50** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 1,255,990.50**
- Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2016 sebesar **Rp. 00** dari tunggakan sebesar **3,731,670.00**, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 3,731,670.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2016 sebesar **Rp. 00** dari tunggakan sebesar **3,599,950.50**, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 3,599,950.50**
- Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2017 sebesar **Rp. 478,960.00** dari tunggakan sebesar **54,820,832.00**, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 54,341,872.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2017 sebesar **Rp. 00** dari tunggakan sebesar **Rp. 859,520.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 859,520.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2018 sebesar **Rp 280,320.00** dari tunggakan sebesar **108,860,590.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 108,580,270.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2018 sebesar **Rp 00** dari tunggakan sebesar **11,997,458.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 11,997,458.00**
- Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2019 sebesar **Rp. 984,960.00** dari tunggakan sebesar **241,609,764.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 240,624,804.00**

- *Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2019 sebesar **Rp 00** dari tunggakan sebesar **64,127,770.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 64,127,770.00***
- *Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2020 sebesar **Rp. 127,960.00** dari tunggakan sebesar **133,941,259.50** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 133,813,299.50***
- *Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2020 sebesar **Rp. 00** dari tunggakan sebesar **63,699,410.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 63,699,410.00***
- *Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli tahun 2021 sebesar **Rp. 84,146,120.00** dari tunggakan sebesar **270,012,476.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 185,866,356.00***
- *Penerimaan retribusi TPI dari Penjual tahun 2021 sebesar **Rp. 73,277,572.00** dari tunggakan sebesar **217,666,758.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 144,389,186.00***
- *Penerimaan retribusi TPI dari Pembeli untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. **633,557,935.50** dari Ketetapan Retribusi sebesar **942,070,609.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 308,512,673.50***
- *Penerimaan retribusi TPI dari Penjual untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. **732,651,639.00** dari Ketetapan Retribusi sebesar **942,070,609.00** sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar **Rp. 209,418,970.00***

Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang dan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel. 4.1.1.4
REKAPITULASI PIUTANG RETRIBUSI
TPI PENGAMBENGAN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	JUMLAH Rp	TERBAYAR Rp	SISA PER 30 April 2022 PER 31 DES 2022	KET
1	Penjual				
	Piutang Per 31 DES 2022	942,070,609.00	732,651,639.00	209,418,970.00	
	Piutang Tahun 2021	217,666,758.00	73,277,572.00	144,389,186.00	
	Piutang Tahun 2020	63,699,410.00		63,699,410.00	
	Piutang Tahun 2019	64,127,770.00		64,127,770.00	
	Piutang Tahun 2018	11,997,458.00		11,997,458.00	
	Piutang Tahun 2017	859,520.00		859,520.00	
	Piutang Tahun 2016	3,599,950.50		3,599,950.50	
	Piutang Tahun 2015	1,255,990.50		1,255,990.50	
	Piutang Tahun 2014	730,298.00		730,298.00	
	JUMLAH	1,306,007,764.00	805,929,211.00	500,078,553.00	
2	Pembeli				
	Piutang Per 31 DES 2022	942,070,609.00	633,557,935.50	308,512,673.50	
	Piutang Tahun 2021	270,012,476.00	84,146,120.00	185,866,356.00	
	Piutang Tahun 2020	133,941,259.50	127,960.00	133,813,299.50	
	Piutang Tahun 2019	241,609,764.00	984,960.00	240,624,804.00	
	Piutang Tahun 2018	108,860,590.00	280,320.00	108,580,270.00	
	Piutang Tahun 2017	54,820,832.00	478,960.00	54,341,872.00	
	Piutang Tahun 2016	3,731,670.00		3,731,670.00	
	Piutang Tahun 2015	14,773,484.00		14,773,484.00	
	Piutang Tahun 2014	5,055,855.00		5,055,855.00	
	Piutang Tahun 2013	14,498,230.00		14,498,230.00	
	JUMLAH	1,789,374,769.50	719,576,255.50	1,069,798,514.00	
	TOTAL	3,095,382,533.50	1,525,505,466.50	1,569,877,067.00	

Tabel 4.1.1.5
Daftar Perhitungan Penyisihan Piutang
Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Piutang					Penyisihan					Piutang Bersih
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
	Jumlah Keseluruhan Piutang	55,945,375.00	62,590,190.00	399,396,078.50	1,051,945,423.50	1,569,877,067.00	279,726.88	6,259,019.00	199,698,039.25	1,051,945,423.50	1,259,167,168.63	310,709,898.38
A	Piutang Retribusi	55,945,375.00	62,590,190.00	399,396,078.50	1,051,945,423.50	1,569,877,067.00	279,726.88	6,259,019.00	199,698,039.25	1,051,945,423.50	1,259,167,168.63	310,709,898.38
1	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	55,945,375.00	62,590,190.00	399,396,078.50	1,051,945,423.50	1,569,877,067.00	279,726.88	6,259,019.00	199,698,039.25	1,051,945,423.50	1,259,167,168.63	310,709,898.38
	Tahun 2022	55,945,375.00	62,590,190.00	399,396,078.50	-	517,931,643.50	279,726.88	6,259,019.00	199,698,039.25	-	206,236,785.13	311,694,858.38
	- Penjual	20,698,530.00	33,363,210.00	155,357,230.00	-	209,418,970.00	103,492.65	3,336,321.00	77,678,615.00	-	81,118,428.65	128,300,541.35
	- Pembeli	35,246,845.00	29,226,980.00	244,038,848.50	-	308,512,673.50	176,234.23	2,922,698.00	122,019,424.25	-	125,118,356.48	183,394,317.03
	Tahun 2021				330,255,542.00	330,255,542.00				330,255,542.00	330,255,542.00	-
	- Penjual				144,389,186.00	144,389,186.00				144,389,186.00	144,389,186.00	-
	- Pembeli				185,866,356.00	185,866,356.00				185,866,356.00	185,866,356.00	-

	Tahun 2020			197,512,709.50	197,512,709.50	-	-	-	197,512,709.50	197,512,709.50	-
	- Penjual			63,699,410.00	63,699,410.00	-	-	-	63,699,410.00	63,699,410.00	-
	- Pembeli			133,813,299.50	133,813,299.50	-	-	-	133,813,299.50	133,813,299.50	-
	Tahun 2019			304,752,574.00	304,752,574.00				304,752,574.00	305,737,534.00	-
	- Penjual			64,127,770.00	64,127,770.00				64,127,770.00	64,127,770.00	-
	- Pembeli			240,624,804.00	240,624,804.00				240,624,804.00	241,609,764.00	-
	Tahun 2018			120,577,728.00	120,577,728.00				120,577,728.00	120,577,728.00	-
	- Penjual			11,997,458.00	11,997,458.00				11,997,458.00	11,997,458.00	-
	- Pembeli			108,580,270.00	108,580,270.00				108,580,270.00	108,580,270.00	-
	Tahun 2017			55,201,392.00	55,201,392.00				55,201,392.00	55,201,392.00	-
	- Penjual			859,520.00	859,520.00				859,520.00	859,520.00	-
	- Pembeli			54,341,872.00	54,341,872.00				54,341,872.00	54,341,872.00	-
	Tahun 2016			7,331,620.50	7,331,620.50				7,331,620.50	7,331,620.50	-
	- Penjual			3,599,950.50	3,599,950.50				3,599,950.50	3,599,950.50	-
	- Pembeli			3,731,670.00	3,731,670.00				3,731,670.00	3,731,670.00	-
	Tahun 2015			16,029,474.50	16,029,474.50				16,029,474.50	16,029,474.50	-
	- Penjual			1,255,990.50	1,255,990.50				1,255,990.50	1,255,990.50	-

- Pembeli				14,773,484.00	14,773,484.00				14,773,484.00	14,773,484.00	-
Tahun 2014				5,786,153.00	5,786,153.00				5,786,153.00	5,786,153.00	-
- Penjual				730,298.00	730,298.00				730,298.00	730,298.00	-
- Pembeli				5,055,855.00	5,055,855.00				5,055,855.00	5,055,855.00	-
Tahun 2013				14,498,230.00	14,498,230.00				14,498,230.00	14,498,230.00	-
- Penjual				-	-				-	-	-
- Pembeli				14,498,230.00	14,498,230.00				14,498,230.00	14,498,230.00	-

Negara, 31 Desember Tahun 2022

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan
dan Perikanan, Kabupaten Jemberana,



Ir. I Ketut Wardananaya
Pembina Tk I
NIP. 19651229 199203 1 011

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Mekanisme Belanja GU dilakukan dengan Sistem E-Transaksi Non Tunai ke Rekening rekanan langsung yang diintegrasikan melalui kerjasama/MoU dengan Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Jemberana. Guna terciptanya Akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah yang relevan, wajib dilaksanakan pengendalian anggaran yaitu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dengan tidak mengurangi kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana.

Realisasi Belanja pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana untuk periode yang berakhir per 31 Desember tahun anggaran 2022 mencapai **Rp. 24,461,691,331.67 (91,16%)**. Belanja pada Dinas perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2022 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana tahun 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021

terdiri dari :

1. **Belanja Pegawai.**

Anggaran pada DPA Induk dialokasikan Rp. **7,247,115,683.00**, dan pada DPA Perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 6,517,516,693.0**, mengalami penurunan dari pengurangan belanja insentif retribusi.

Realisasi Belanja Pegawai mencapai **Rp. 5,877,178,020.00 (90,18%)**, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **Rp 19.668.737,55 atau 0,3%** dari capaian realisasi tahun 2021 **Rp. 5,857,509,282.45**

Tabel : 4.1.2.1 Realisasi Belanja Pegawai

NO	URAIAN	TAHUN 2022				REALISASI 2021
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3,116,236,531.00	2,644,885,045.00	2,417,735,100.00	91.41	2,437,582,120.00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK		11,866,000.00	-	-	-
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	288,307,300.00	288,307,300.00	246,233,326.00	85.41	242,450,132.00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		1,651,240.00	-	-	
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	117,390,000.00	129,012,750.00	119,370,000.00	92.53	168,150,000.00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52,920,000.00	76,900,000.00	68,900,000.00	89.60	
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		2,160,000.00	-	-	
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102,194,125.00	102,194,125.00	82,525,000.00	80.75	80,465,000.00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	158,132,980.00	158,422,660.00	131,949,240.00	83.29	132,311,340.00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK		1,158,720.00	-	-	
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35,366,300.00	35,366,300.00	18,395,836.00	52.02	7,455,176.00
12	Belanja Pembulatan Gaji PNS	150,604.00	170,604.00	33,384.00	19.57	33,106.00
13	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		1,000.00	-	-	
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	206,927,546.00	207,927,546.00	172,869,306.00	83.14	187,640,926.00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		627,488.00	-	-	
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7,215,186.00	7,222,305.00	4,929,137.00	68.25	4,981,095.00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		28,480.00	-	-	
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18,312,681.00	18,334,040.00	14,787,497.00	80.66	14,943,385.00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		85,436.00	-	-	
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,813,412,930.00	2,813,411,930.00	2,599,450,194.00	92.39	2,473,201,609.00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		17,783,724.00	-	-	
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30,000,000.00			-	25,240,000.00
23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8,000,000.00			-	-

24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	15,662,400.00			-	15,659,629.55
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	25,440,000.00			-	13,649,489.56
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2,080,000.00			-	2,080,000.00
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	55,200.00			-	-
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	160,000.00			-	160,000.00
29	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60,000,000.00			-	-
30	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	13,000,000.00			-	-
31	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	27,993,600.00			-	-
32	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	53,600,000.00			-	-
33	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2,080,000.00			-	-
34	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	55,200.00			-	-
35	28 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	160,000.00			-	-
36	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45,000,000.00			-	24,760,000.00
37	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5,000,000.00			-	-
38	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	14,103,100.00			-	14,102,893.90
39	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	28,160,000.00			-	12,643,380.44
JUMLAH		7,247,115,683.00	6,517,516,693.00	5,877,178,020.00	90.18	5,857,509,282.45

2. Belanja Barang dan Jasa

A. Realisasi Belanja Jasa Tenaga Kontrak

Analisis table Realisasi Belanja Jasa Tenaga Kontrak Tahun 2022 belum optimal capaian realisasi per bulan, karena ada beberapa tenaga kontrak yang berhenti dan diganti dengan yang baru. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah tenaga kontrak bertambah lagi 5 orang.

Berikut rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa Tenaga Kontrak tahun 2022 dengan 2021 pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan perikanan Kabupaten Jembrana :

No	Nama Jabatan Non PNS	Nama Rekening Belanja	Sub Kegiatan	TAHUN 2022								%	TAHUN 2021		
				Anggaran				Realisasi					Realisasi		
				Orang	Rp.	Bulan	Jumlah	Orang	Rp.	Bulan	Jumlah		Orang	Rp.	Jumlah
1	JASA TENAGA ADMINISTRASI	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	1	1,265,000	12	15,180,000	1	1,265,000	12	15,180,000	100	1	1,265,000	15,180,000
	PETUGAS JURU TIMBANG/JURU LELANG TPI	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	14	1,265,000	12	212,520,000	14	1,265,000	12	212,520,000	100	14	1,265,000	212,520,000
	Petugas Administrasi	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	4	1,265,000	6	30,360,000	4	1,265,000	4	20,240,000	66.67	-	1,265,000	-
	JASA TENAGA ADMINISTRASI	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	8	1,265,000	12	121,440,000	8	1,265,000	12	118,910,000	97.92	8	1,265,000	121,440,000
	Penjaga Pasar/Enumerator/Petugas Pemungut Restribusi	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	0	1,265,000	12	-	-	1,265,000	12	-	-	75	1,265,000	1,122,055,000
	JASA TENAGA ADMINISTRASI	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	2	1,265,000	12	30,360,000	2	1,265,000	12	30,360,000	100	20	1,265,000	302,335,000
	JASA TENAGA ADMINISTRASI	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	2	1,265,000	12	30,360,000	2	1,265,000	12	29,095,000	95.83	25	1,265,000	378,235,000

	Petugas Administrasi	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	3	1,265,000	12	45,540,000	3	1,265,000	12	43,010,000	94.44	11	1,265,000	163,185,000
	JASA TENAGA ADMINISTRASI	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	2	1,265,000	12	30,360,000	2	1,265,000	12	29,095,000	95.83	2	1,265,000	30,360,000
	Petugas Administrasi	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	2	1,265,000	12	30,360,000	2	1,265,000	12	30,360,000	100	8	1,265,000	115,115,000
	JASA TENAGA ADMINISTRASI	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)	4	1,265,000	12	60,720,000	4	1,265,000	12	56,925,000	93.75	10	1,265,000	151,800,000
				42			607,200,000.00	42			585,695,000.00	96.46	174		2,612,225,000
2	Tenaga Sopir	5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Jasa Tenaga Supir)	1	1,265,000	12	15,180,000	1	1,265,000	12	15,180,000	100.00	1	1,265,000	15,180,000
	Tenaga Sopir	5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja Jasa Tenaga Supir)	1	1,265,000	12	15,180,000	1	1,265,000	12	15,180,000	100.00	1	1,265,000	15,180,000
	Tenaga Sopir	5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Supir)	3	1,265,000	12	45,540,000	3	1,265,000	12	44,275,000	97.22	3	1,265,000	45,540,000
				5			75,900,000	5			74,635,000	98.33	5		75,900,000

2	CLEANING SERVICE	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan)	1	1,265,000	12	15,180,000	1	1,265,000	12	15,180,000	100	1	1,265,000	15,180,000
				1	1,265,000	12	15,180,000	1	1,265,000	12	15,180,000	100	1	1,265,000	15,180,000
3	Penjaga pasar/enumerator/petugas pemungut Retribusi	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Pelayanan Umum)	75	1,265,000	12	1,138,500,000	75	1,265,000	12	1,090,430,000	95.78	-	1,265,000	-
	Penjaga pasar/enumerator/petugas pemungut Retribusi	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Pelayanan Umum)	4	1,265,000	6	30,360,000	4	1,265,000	6	30,360,000	100.00	-	1,265,000	-
	Penjaga pasar/enumerator/petugas pemungut Retribusi	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	6	1,265,000	12	91,080,000	6	1,265,000	12	91,080,000	100.00	-	1,265,000	-
	Petugas Pelayanan Terminal	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	11	1,265,000	12	166,980,000	11	1,265,000	12	145,475,000	87.12	-	1,265,000	-
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	6	1,265,000	12	91,080,000	6	1,265,000	12	91,080,000	100.00	-	1,265,000	-
	Penjaga pasar/enumerator/petugas pemungut Retribusi	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	11	1,265,000	12	166,980,000	11	1,265,000	12	131,560,000	78.79		1,265,000	

	Petugas Pelayanan Terminal	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	3	1,265,000	12	45,540,000	3	1,265,000	12	45,540,000	100.00		1,265,000	
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	6	1,265,000	12	91,080,000	6	1,265,000	12	91,080,000	100.00		1,265,000	
4	PETUGAS PENERANGAN JALAN	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	6	1,265,000	12	91,080,000	6	1,265,000	12	88,550,000	97.22		1,265,000	
	PETUGAS PEMBANTU PENGUJI	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	6	1,265,000	12	91,080,000	6	1,265,000	12	80,960,000	88.89	-	1,265,000	
	PETUGAS PEMBANTU PENGUJI	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	3	1,265,000	6	22,770,000	3	1,265,000	4	15,180,000	66.67	-	1,265,000	
				137			2,026,530,000.00	137			1,901,295,000.00	93.82	-		
5	TENAGA JAGA MALAM	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Belanja Jasa Tenaga Keamanan)	1	1,265,000		15,180,000	1	1,265,000		15,180,000	100.00	-	1,265,000	
			TOTAL	185			2,724,810,000	185			2,576,805,000	94.57	180		2,703,305,000

b. Belanja Barang dan Jasa.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun anggaran 2022 mencapai **Rp. 15,921,948,188.29 (86,30%)** dimana anggaran disediakan sebesar **Rp. 16,865,737,319.00**. perbandingan capaian realisasi tahun 2022 dengan 2021 kebutuhan sarana dan prasarana meningkat di tahun 2022, dengan rincian realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel : 4.1.2.2 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Barang dan Jasa	16,865,737,319.00	15,921,948,188.29	86.30	15,011,557,113.01
a	Belanja Barang	1,757,441,315.00	1,516,667,368.00	86.30	1,096,896,420.00
-	Belanja Barang Pakai Habis	1,757,441,315.00	1,516,667,368.00	86.30	1,096,896,420.00
b	Belanja Jasa	12,981,036,000.00	12,594,134,921.00	97.02	12,034,810,555.34
-	Belanja Jasa Kantor	12,869,280,000.00	12,521,458,871.00	97.30	11,935,188,981.00
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	51,756,000.00	42,867,000.00	82.83	21,785,000.00
-	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60,000,000.00	29,809,050.00	49.68	16,494,500.00
-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	9,835,800.00
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	51,506,274.34
c	Belanja Pemeliharaan	1,780,694,004.00	1,576,803,061.29	88.55	1,822,897,137.67
-	Belanja Pemeliharaan Tanah	20,000,000.00	19,945,500.00	99.73	-
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	546,545,950.00	349,464,653.00	63.94	373,953,360.00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	398,000,000.00	395,810,521.79	99.45	220,520,310.67
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	816,148,054.00	811,582,386.50	99.44	1,228,423,467.00
d	Belanja Perjalanan Dinas	304,166,000.00	191,942,838.00	63.10	56,953,000.00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	304,166,000.00	191,942,838.00	63.10	56,953,000.00
e	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42,400,000.00	42,400,000.00	100.00	-
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	-
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22,400,000.00	22,400,000.00	100.00	-

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000.00, terdiri dari hibah Rp 30.000.000 untuk Kelompok Nelayan Putra Segara (I Gusti Ngurah Anom pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan hibah sebesar Rp.20.000.000 untuk Ni Luh Yulastini (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Perikanan (Poklahsar) Cahaya Buana II pada Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan rekening Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Realisasi Belanja hibah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000 (60%), sedangkan sisa Rp. 20.000.000 tidak terealisasi karena bantuan ditolak oleh kelompok karena sebagian pengurus sudah tidak aktif. Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan 2021 dapat dilihat pada table berikut ini, dimana tahun 2021 tidak menganggarkan belanja hibah :

Tabel 4.1.2.3 Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
-	Belanja Hibah	50,000,000.00	30,000,000.00	60.00	-
-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50,000,000.00	30,000,000.00	60.00	-
-	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50,000,000.00	30,000,000.00	60.00	-

4. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dianggarkan sebesar Rp. 2,450,049,019.00, terdiri dari : 1) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu berupa Pemberian Bantuan berupa subsidi BBM kepada Nelayan dan Pemberian Bantuan berupa subsidi BBM kepada Angkutan Umum dialokasikan (Rp. 1,470,000,000.00) dan 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa : 1) Pengadaan sarana prasarana untuk kelompok P2HP (Rp. 60.049.019), 2) Bahan Alat Tangkap Jaring Monofilamen dan Multifilamen (Rp. 720.000.000) dan 3) Pengadaan Sarpras Budidaya Udang Vaname untuk 4Klp (Rp. 200.000.00). Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1,702,793,242.26 (69,50%). Serapan anggaran dibawah 85% dikarenakan sebagian nelayan sudah mendapatkan bantuan , berupa BLT, PKH dan bantuan lainnya yang sejenis. Berikut perbandingan realisasi belanja bantuan social tahun 2022 dengan 2021:

Tabel 4.1.2.4 Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
-	Belanja Bantuan Sosial	2,450,049,019.00	1,702,793,242.26	69.50	2,364,554,600.77
a	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1,470,000,000.00	741,372,358.00	50.43	-
-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1,470,000,000.00	741,372,358.00	50.43	-
b	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	980,049,019.00	961,420,884.26	98.10	2,364,554,600.77
-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	980,049,019.00	961,420,884.26	98.10	2,364,554,600.77

5. Belanja Modal

Alokasi Anggaran Belanja Modal yang disediakan sebesar Rp. 949.653.000,00, Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun anggaran 2022 mencapai Rp. 929,771,881.12 (97,91%), sisa anggaran sebesar Rp. 19,881,118.88 (2,09%). Rincian realisasi belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1.2.5 Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	BELANJA MODAL	949,653,000.00	929,771,881.12	97.91	2,186,917,288.88
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300,488,000.00	294,596,100.00	98.04	1,821,507,314.08
-	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	36,600,000.00	36,077,000.00	98.57	1,774,929,814.08
-	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
-	Belanja Modal Alat Ukur	26,600,000.00	26,077,000.00	98.03	1,774,929,814.08
-	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92,104,000.00	90,650,100.00	98.42	1,412,700.00
-	Belanja Modal Alat Kantor				-
-	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15,109,000.00	14,601,100.00	96.64	1,412,700.00
-	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6,500,000.00	6,200,000.00	95.38	-
-	Belanja Modal Komputer	141,784,000.00	137,989,000.00	97.32	45,164,800.00
-	Belanja Modal Komputer Unit	102,584,000.00	99,989,000.00	97.47	45,164,800.00
-	Belanja Modal Peralatan Komputer	39,200,000.00	38,000,000.00	96.94	-
-	Belanja Modal Rambu-Rambu	30,000,000.00	29,880,000.00	99.60	-

-	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30,000,000.00	29,880,000.00	99.60	-
b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	632,000,000.00	618,240,781.12	97.82	-
-	Belanja Modal Bangunan Gedung	632,000,000.00	618,240,781.12	97.82	-
-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	632,000,000.00	618,240,781.12	97.82	-
c	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	365,409,974.80
-	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	-	365,409,974.80
d	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,165,000.00	16,935,000.00	98.66	-
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	17,165,000.00	16,935,000.00	98.66	-

6. Surplus/Defisit Realisasi Anggaran

Dari realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 5.891.676.250,50 dan belanja sebesar Rp 24.461.691.331,67 dihasilkan defisit sebesar Rp 18.570.015.081,17. Nilai defisit tersebut masih lebih kecil Rp 8.262.940.949,83 atau 69,20% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 26.832.956.031,00

7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)

Perhitungan SILPA Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 merupakan sisa kurang senilai defisit sebesar Rp 18.570.015.081,17 yang menunjukkan kekurangan pendapatan dibanding belanja. Kekurangan tersebut di penuhi dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.2 Pos-pos Laporan Operasional

4.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui saat menetapkan jumlah penerimaan kepada wajib retribusi daerah. Pendapatan dengan ketetapan diakui melalui dokumen SKRD seperti retribusi TPI. Sedangkan retribusi lainnya yang tanpa ketetapan diakui transaksi dilakukan dengan dokumen lain selain SKRD seperti STS atau dokumen yang dipersamakan. Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp 6,250,312,002 mengalami kenaikan sebesar Rp 817,562,418 atau 15,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5,432,749,584. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.2.1 Capaian Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022-2021

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-	-
PENDAPATAN	6,250,312,002.00	5,432,749,584.00	817,562,418.00	15.05
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6,250,312,002.00	5,432,749,584.00	817,562,418.00	15.05
Pendapatan Retribusi Daerah	6,151,979,443.00	5,371,603,540.00	780,375,903.00	14.53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98,332,559.00	61,146,044.00	37,186,515.00	60.82
			-	-
BEBAN	24,595,535,836.88	25,136,152,074.23	(540,616,237.35)	(2.15)
Beban Pegawai	5,877,178,020.00	5,806,002,608.11	71,175,411.89	1.23
Beban Persediaan	1,354,737,468.00	1,241,740,120.00	112,997,348.00	9.10
Beban Jasa	12,636,534,921.00	12,034,810,555.34	601,724,365.66	5.00
Beban Pemeliharaan	1,576,803,061.29	1,822,897,137.67	(246,094,076.38)	(13.50)
Beban Perjalanan Dinas	191,942,838.00	56,953,000.00	134,989,838.00	237.02
Beban Hibah	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
Beban Bantuan Sosial	1,702,793,242.26	2,364,554,600.77	(661,761,358.51)	(27.99)
Beban Penyisihan Piutang	(531,715,339.67)	109,889,718.34	(641,605,058.01)	(583.86)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,757,261,626.00	1,699,304,334.00	57,957,292.00	3.41
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(18.345.223.834,88)	(19.703.402.490,23)	1.358.178.655,35	
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.345.223.834,88)	(19.703.402.490,23)	1.358.178.655,35	
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.345.223.834,88)	(19.703.402.490,23)	1.358.178.655,35	-

4.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pendapatan dan beban untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022, dapat dilihat pada lampiran-lampiran pendukung dan pada uraian berikut ini :

1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai-LO untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 5.877.178.020**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rincian Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 pada laporan operasional menunjukkan pengakuan dari beban gaji dan tunjangan, berbeda dengan tahun sebelumnya tahun 2021 mengakui dari beban gaji dan tunjangan PNS, Beban Tambahan Penghasilan PNS dan Beban Insentif bagi ASN atas Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 4.2.2.1 Rincian perbandingan Beban Pegawai

untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	5,877,178,020.00	3,276,011,880.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	0.00	2,473,201,609.00
Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	56,789,119.11
Jumlah	5,877,178,020.00	5,806,002,608.11

2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.354.737.468. mengalami kenaikan sebesar Rp. 112.997.348 atau 9,10%, capaian realisasi beban persediaan tahun 2021 sebesar Rp, 1.241.740.120. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

3. Beban Jasa

Realisasi Beban jasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah **Rp 12.636.534.921**. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Perbandingan rincian Beban Jasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Beban Jasa	2022	2021	%
	12.636.534.921	12.034.810.555,34	5%

4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah biaya yang timbul untuk pemeliharaan rutin suatu aset agar tetap dalam kondisi kerja aslinya. Beban pemeliharaan dicatat dalam akun laba rugi, sehingga mengurangi laba tahun berjalan. Manfaat biaya pemeliharaan diperkirakan tidak akan bertahan melebihi jangka waktu 12 bulan. Realisasi Beban Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan tahun 2022 sebesar **Rp. 1.576.603.061,29** atau **88,55%**, dibandingkan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp. 246.294.076,38 (13,51%)** dari capaian realisasi tahun 2021 **Rp. 1.822.897.137,67**. Rincian perbandingan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2.2.2 Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
a	Beban Pemeliharaan	1,780,694,004.00	1,576,803,061.29	88.55	1,822,897,137.67
-	Beban Pemeliharaan Tanah	20,000,000.00	19,945,500.00	99.73	-
-	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	546,545,950.00	349,464,653.00	63.94	373,953,360.00
-	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	398,000,000.00	395,810,521.79	99.45	220,520,310.67
-	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	816,148,054.00	811,582,386.50	99.44	1,228,423,467.00

6. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2022 sebesar Rp. 191.942.838, terjadi peningkatan sebesar Rp. 134.989.838 atau 70,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 Rp. 56.953.000. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam provinsi berdasarkan surat undangan yang diterima. Berikut rincian perbandingan realisasi tahun 2022-2021 :

Tabel. 4.2.2.3 Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
a	Beban Perjalanan Dinas	269,140,000.00	161,822,838.00	60.13	56,953,000.00
-	Beban Perjalanan Dinas Biasa	151,986,000.00	68,219,450.00	44.89	51,243,600.00
-	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	117,154,000.00	93,603,388.00	79.90	5,709,400.00

7. Beban Hibah-LO

Realisasi Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000 tercapai (60%) dari anggaran yang disediakan Rp. 50.000.000. dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2021 mengalami peningkatan, karena tahun 2021 tidak mengalokasikan anggaran Belanja Hibah.

8. Beban Bantuan Sosial-LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun 2022 adalah **Rp. 1,702,793,242.26** mengalami penurunan sebesar (661.761.358,51) atau (27,99%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar **Rp 2,364,554,600.77**. hal ini disebabkan karena di tahun 2022 bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan sarana prasarana perikanan yang belum diberikan di tahun 2021. ada 2 jenis rincian beban bantuan sosial yaitu Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dan Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada table berikut ini :

Beban Bantuan Sosial	2022	2021	%
	1,702,793,242.26	2,364,554,600.77	(27,99%)

Tabel. 4.2.2.3 Beban Bantuan Sosial-LO

No	Uraian Jenis Beban Bantuan Sosial Tahun 2022	Beban Bantuan Sosial-LO PER TANGGAL 31 Desember 2022	Uraian Jenis Beban Bantuan Sosial Tahun 2021	Beban Bantuan Sosial-LO PER TANGGAL 31 Desember 2021
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat-LO	961,420,884.26	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat-LO	2,364,554,600.77

-	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Sarpras Budidaya Udang Vaname untuk 4Klp,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA utk kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	198,227,000.00	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Ikan Air Tawar (Paket Percontohan Budidaya Gurami dan Paket Budidaya Lele di Kolam (18klp) ,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA utk kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	962,387,880.00
-			Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Probiotik ,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA utk kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,048,000.00
-			Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Sarpras Budidaya Sistem Bioplok (7 klp) ,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA utk kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	145,178,950.00
-			Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Percontohan Budidaya Udang Vaname ,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA utk kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	151,979,150.00
-			Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Pembuatan Kolam Bundar Budidaya Lele Sistem Bioplok ,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA utk kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	263,825,123.27
-	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa pengadaan Bahan Alat Tangkap Jaring Monofilamen dan Multifilamen,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP utk kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota , sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	703,827,607.86	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Bahan Jaring Monofilament dan Multifilament, pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	606,515,997.50
-	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan sarana prasarana untuk kelompok P2HP pada PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, kegiatan PPenyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59,366,276.40	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Pengadaan sarana prasarana untuk kelompok P2HP, pada PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, kegiatan PPenyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	134,619,500.00

2	Beban Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu -LO	741,372,358.00	Beban Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu -LO
	Beban Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu berupa Pemberin Bantuan Berupa Subsidi BBM Kepada Nelayan,pada PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP utk kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota , sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	665,393,488.00	
	Beban Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu berupa Pemberian Bantuan berupa subsidi BBM kepada Angkutan Umum,pada PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) utk kegiatan PPenyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota , sub kegiatan PPenyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,978,870.00	
	JUMLAH	1,702,793,242.26	2,364,554,600.77

9. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. (310.709.898,38) mengalami penurunan sebesar Rp 531.715.339,67 atau 63,11% dibandingkan dengan Penyisihan Piutang Retribusi TPI tahun 2021 Rp. (842,425,238.05). hal ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran tunggakan piutang retribusi TPI Pembeli dan Penjual tahun 2022-2013 baik dalam katagori macet, ragu-ragu, kurang lancer dan lancar.

10. Beban Penyusutan dan amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1,658,077,023**, dibandingkan dengan tahun 2021 Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp. 1,681,135,733.00** mengalami penurunan sebesar **Rp. 23.058.710** atau (1,3%). Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi 2022-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2.2.4 Beban Penyusutan dan amortisasi

No	Uraian Jenis Beban Penyusutan dan amortisasi Tahun 2022	Beban Penyusutan dan amortisasi-LO PER TANGGAL 31 Desember 2022	Uraian Jenis Beban Penyusutan dan amortisasi Tahun 2021	Beban Penyusutan dan amortisasi-LO PER TANGGAL 31 Desember 2021
	Beban Penyusutan dan amortisasi-LO	1,658,077,023.00	Beban Penyusutan dan amortisasi-LO	1,681,135,733.00
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	754,635,883.00	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	548,073,461.00
-	Beban Penyusutan Electric Genetaring Set	15,790,500.00	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	33,571,428.00
-	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	33,571,429.00	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	225,000.00
-	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2,000,000.00	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	28,303,425.00
-	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	225,000.00	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6,555,000.00
-	Beban Penyusutan Perkakas Standard (Standard Tools)	333,332.00	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	2,805,000.00
-	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	19,649,450.00	Beban Penyusutan Meubelair	15,903,240.00
-	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	322,048,064.00	Beban Penyusutan Alat Pembersih	1,500,000.00
-	Beban Penyusutan Mesin Ketik	93,633.00	Beban Penyusutan Alat Pendingin	11,825,000.00
-	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5,501,199.00	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,823,545.00
-	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	2,302,400.00	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	2,711,999.00
-	Beban Penyusutan Meubelair	11,136,310.00	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	8,800,000.00
-	Beban Penyusutan Alat Pendingin	1,600,000.00	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB	13,060,000.00
-	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,929,540.00	Beban Penyusutan Alat Keamanan	3,500,001.00
-	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	2,000,000.00	Beban Penyusutan Personal Komputer	42,641,009.00
-	Beban Kursi Kerja Pejabat	206,667.00	Beban Penyusutan Peralatan Mini Komputer	750,000.00
-	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	8,800,000.00	Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	15,323,750.00
-	Beban Penyusutan Personal Komputer	45,095,318.00	Beban Penyusutan Electric Genetaring Set	1,315,875.00
-	Beban Penyusutan Peralatan Mini Komputer	750,000.00	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	166,667.00
-	Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	18,841,041.00	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	725,000.00
-	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	725,000.00	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	258,543,000.00
-	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	260,037,000.00	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	98,024,522.00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	467,350,637.00	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	666,066,056.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	43,711,859.00	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	45,418,692.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	7,842,142.00	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	10,669,182.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	23,891,740.00	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	23,891,740.00

	Pertokoan/Koperasi/Pasar		Pertokoan/Koperasi/Pasar	
-	'Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	9,620,739.00	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	13,166,332.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	366,634,058.00	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	371,818,859.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan	21,828,182.00	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan	21,828,182.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	22,944,627.00	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	22,944,627.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Industri	98,841,080.00	Beban Penyusutan Bangunan Industri	98,841,080.00
-	Beban i Penyusutan Bangunan Peternakan/Perikanan	9,661,700.00	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/Perikanan	9,661,700.00
-	Beban Penyusutan Taman	630,000.00	Beban Penyusutan Taman	630,000.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46,828,995.00	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	47,195,662.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	-13,189,167.00		
-	Beban Penyusutan 'Bangunan Gudang	-36,751,520.00		
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	-19,661,927.00		
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-109,048,538.00		
-	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-6,433,333.00		
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	413,046,633.00	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	443,952,346.00
-	Beban Penyusutan Jalan Khusus	24,611,150.00	Beban Penyusutan Jalan Khusus	24,611,150.00
-	Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	19,986,860.00	Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	19,986,860.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	33,432,900.00	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	70,499,600.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	15,681,600.00	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	15,681,600.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	18,608,366.00	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	18,608,366.00
-	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	4,585,350.00	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	4,585,350.00
-	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8,190,332.00	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8,190,332.00
-	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	54,448,392.00	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	51,332,395.00
-	Beban Penyusutan Instalasi Lain	233,501,683.00	Beban Penyusutan Instalasi Lain	230,456,693.00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	23,043,870.00	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	23,043,870.00
-	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	23,043,870.00	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	23,043,870.00

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada *data lampiran pendukung*.

4.3 Pos-pos Neraca

Neraca Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset dalam neraca diperoleh dari sumber dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Total aset Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2022 sebesar Rp 61.864.012.625,78 sedangkan tahun 2021 Aset dalam neraca dengan total aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 66.844.559.770,66. Penurunan aset terjadi adanya kenaikan pembayaran piutang dari tahun sebelumnya oleh Wajib Retribusi Penjual dan Pembeli dari penerimaan Retribusi TPI yang memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan piutang Retribusi TPI dan penurunan dari mutasi aset tetap peralatan dan mesin karena adanya reklas antar kelompok aset, Mutasi Keluar Antar SKPD dari aset tetap tanah, penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Daerah Kabupaten Jembrana No : 032/002/BPKAD/2022.

4.3.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Setelah adanya penyesuaian aset, penyusutan pada aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dapat dilihat pada lampiran Laporan Neraca per tanggal 31 Desember Tahun 2022.

Berikut analisis perbandingan nilai aset per jenis aset tahun 2022 dan tahun 2021 :

Tabel 4.3.1 Aset

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	1,525,301,112.62	473,020,121.45	1,052,280,991.17	68.99
Aset Tetap	61,864,012,625.78	66,844,559,770.66	(4,980,547,144.88)	(8.05)
Aset Lainnya	1,119,867,876.00	1,121,101,476.00	(1,233,600.00)	(0.11)
Total Aset	64,509,181,614.40	68,438,681,368.11	(3,929,499,753.71)	(6.09)

Aset terdiri dari :**a. Aset Lancar**

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang disajikan dalam Neraca Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.525.301.112,62** meliputi :

- 1). Kas di bendahara penerimaan-Bank sebesar Rp 00
- 2). Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank untuk Periode yang berakhir per tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp.00. *Penatausahaan keuangan bendahara pengeluaran terdapat pembukuan beberapa penyesuaian belanja atas koreksi pembulatan gaji (222), koreksi atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik pemasangan lampu LED PJU (106.250), koreksi atas pengembalian kelebihan pembayaran listrik PJU bulan September SP2D : 04.0/00217/SP2D/LS/DPKP/2022, koreksi atas PFK lainnya pembayaran pembulatan gaji PNS (50), koreksi atas kesalahan input rekening BBM ke rekening pemeliharaan kendaraan sesuai bukti pengeluaran :113/K/222 TGL 8 JULI 2022 sebesar Rp.. 46.568.413*
- 3). Piutang Retribusi untuk periode per tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebesar **Rp. 1.569.877.067,00** merupakan akumulasi piutang retribusi TPI dari tahun 2013 s/d per tanggal 31 Desember Tahun *tahun 2022, dimana* mengalami peningkatan sebesar **Rp. 358.635.751,50** dari jumlah piutang tahun 2021 **Rp. 1.211.241.315,50**. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembayaran piutang retribusi TPI dari tahun sebelumnya, hal ini dilihat dari perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.
- 4). Penyisihan piutang tak tertagih sebesar **(310.709.898,38)** merupakan akumulasi penyisihan piutang retribusi TPI dari tahun 2013 s/d per tanggal 31 Desember Tahun 2022. *Dibandingkan dengan jumlah penyisihan piutang tahun 2021 (842.425.238,05) mengalami penurunan sebesar 531.715.339,674. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan wajib retribusi TPI yang*

melaksanakan kewajiban pembayaran piutang dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2022

- 5). Persediaan. Nilai persediaan barang yang ada di neraca mempunyai kriteria pakai habis. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 266.133.944,00** mengalami peningkatan sebesar Rp 161,929,900.00 atau 60,85% dari nilai persediaan tahun 2021 sebesar **Rp. 104,204,044.00**. hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.3.2 Persediaan

Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
ALAT TULIS KANTOR	68,706,400.00	77,288,600.00	(8,582,200.00)	(12.49)
KERTAS DAN COVER	93,900.00	93,900.00	-	-
BAHAN CETAK	191,022,944.00	18,354,944.00	172,668,000.00	90.39
BENDA POS	950,000.00	1,280,000.00	(330,000.00)	(34.74)
BAHAN KOMPUTER	1,719,000.00	-	1,719,000.00	100.00
ALAT LISTRIK	2,842,700.00	-	2,842,700.00	100.00
ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	799,000.00	7,186,600.00	(6,387,600.00)	(799.45)
Total Persediaan	266,133,944.00	104,204,044.00	161,929,900.00	60.85

Metode pencatatan persediaan yang digunakan di Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan adalah metode periodik karena persediaan yang ada sifatnya sebagai pendukung kegiatan seperti alat tulis kantor, dll. Metode penilaiannya menggunakan metode FIFO (First In First Out).

b. Aset Tetap.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 61,864,012,625.78 pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan yang merupakan perhitungan Aset tetap secara keseluruhan. Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 4.3.2 Aset Tetap

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Dalam Rupiah	
			Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	26,230,591,318.44	29,830,591,318.44	(3,600,000,000.00)	(13.72)
Peralatan dan Mesin	13,393,929,258.08	13,099,333,158.08	294,596,100.00	2.20
Gedung dan Bangunan	33,174,808,203.86	33,484,778,422.74	(309,970,218.88)	(0.93)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11,984,009,807.40	11,610,089,807.40	373,920,000.00	3.12
Aset Tetap Lainnya	1,300,993,495.00	1,300,993,495.00	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,813,500.00	49,813,500.00	-	-
Akumulasi Penyusutan	(24,270,132,957.00)	(22,531,039,931.00)	(1,739,093,026.00)	7.17
Total Aset Tetap	61,864,012,625.78	66,844,559,770.66	(4,980,547,144.88)	(8.05)

Terdapat pengurangan total aset tetap ditahun 2022 sebesar Rp. 4,980,547,144.88 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar Rp. 66,844,559,770.66. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian pengurangan dan penambahan aset tetap berupa tanah, terjadi penurunan nilai aset karena mutasi ke antar SKPD, penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin karena penyesuaian dari pengadaan belanja modal dan reklas, penghapusan aset tetap gedung dan bangunan. Adapun rincian dari aset tetap diantaranya:

- 1). **Tanah**, Saldo aset tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 26,230,591,318.44. Dengan perhitungan mutasi sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal Tanah	29,830,591,318.44
2	Pengurangan Aset Tanah	
	Mutasi Keluar Antar SKPD	
	Jumlah Pengurang Aset Tanah	-
3	Pengurangan Aset Tanah	
	Mutasi keluar antar SKPD	(3,600,000,000.00)
	Reklas Ke Aset lain-lain	
	Koreksi Pencatatan	
	Jumlah Pengurang Aset Tanah	-
4	Saldo Akhir Tanah	26,230,591,318.44

Dari pencatatan mutasi barang aset tetap tanah dapat dijelaskan bahwa tanah yang bersertifikat No : AB 795203 tahun perolehan tahun 1991 luas 2.000 dengan nilai perolehan : 1.800.000.000 dan sertifikat No ; AB 795204 tahun perolehan tahun 1991 luas 2.000 dengan nilai perolehan : 1.800.000.000 berlokasi di terminal cargo dimutasikan pengelolaan ke SKPD disperindagkop (terlampir)

2. Peralatan dan Mesin saldo awal tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **Rp. 13.099.333.158.08** dimana terjadi penambahan sebesar **Rp. 458,364,100.00** dan penurunan nilai aset tetap sebesar **Rp. 163,768,000.00** hal ini dapat dianalisis bahwa penambahan terjadi dari transaksi belanja modal dan penurunan karena adanya reklas antar kelompok aset. Sehingga *saldo akhir Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember Tahun 2022 menjadi Rp. 13,393,929,258.08.* berikut rincian nilai aset dari penambahan dan pengurangan dapat disajikan pada table berikut ini

Peralatan dan Mesin	2021/Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Mutasi Dari 1 Januari sd 31 Desember 2022		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
02 Peralatan dan Mesin	13,099,333,158.08	458,364,100.00	163,768,000.00	13,393,929,258.08
02 Alat Berat	409,733,500.00	-	-	409,733,500.00
02 Alat Angkutan	4,032,679,000.00	-	-	4,032,679,000.00
03 Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,126,712,814.08	46,077,000.00	10,000,000.00	2,162,789,814.08
Transaksi Bertambah				
Belanja Modal		36,077,000.00		
Reklas dari Klp Aset		10,000,000.00		
Transaksi Berkurang				
Reklas ke Klp Aset			10,000,000.00	
04 Alat Pertanian	21,200,000.00	-	-	21,200,000.00
05 Alat Kantor dan Rumah Tangg	1,982,790,096.00	158,549,100.00	67,899,000.00	2,073,440,196.00
Transaksi Bertambah				-
Belanja Modal		90,650,100.00		
Reklas dari Klp Aset		67,899,000.00		
Transaksi Berkurang				-
Reklas ke Klp Aset			67,899,000.00	
06 Alat Studio, Komunikasi, dan P	239,173,500.00			239,173,500.00
07 Alat Kedokteran dan Kesehata				
08 Alat Laboratorium	31,600,000.00			31,600,000.00
09 Alat Persenjataan	10,500,000.00			10,500,000.00
10 Komputer	760,651,748.00	193,978,000.00	55,989,000.00	898,640,748.00
Transaksi Bertambah				-
Belanja Modal		137,989,000.00		

Reklas dari Klp Aset		55,989,000.00		
Transaksi Berkurang				-
Reklas ke Klp Aset			55,989,000.00	
11 Alat Eksplorasi				
12 Alat Pengeboran				
13 Alat Produksi, Pengolahan dan				
14 Alat Bantu Eksplorasi				
15 Alat Keselamatan Kerja				
16 Alat Peraga				
17 Peralatan Proses / Produksi				
18 Rambu Rambu	3,484,292,500.00	59,760,000.00	29,880,000.00	3,514,172,500.00
Transaksi Bertambah				-
Belanja Modal		29,880,000.00		
Reklas dari Klp Aset		29,880,000.00		
Transaksi Berkurang				
Reklas ke Klp Aset			29,880,000.00	
19 Peralatan Olahraga				

- 3). **Gedung dan Bangunan**. Saldo aset tetap Gedung dan bangunan merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 33.174.808.203,88**. Dibandingkan dengan tahun 2021, penurunan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 309.970.218,86. Dari kondisi akhir nilai aset tetap gedung dan bangunan tahun 2021 sebesar **Rp. 33.484.778.422,74**. Penurunan nilai aset terjadi karena adanya penambahan nilai sebesar **Rp 618.240.781,12** dan pengurangan dari penghapusan sebesar nilai **Rp. 928,211,000.00**. dengan perhitungan mutasi sebagai berikut:

Uraian	Akhir 2021/Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Mutasi Dari 1 Januari sd 31 Desember 2022		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
03 Gedung dan Bangunan	33,484,778,422.74			
		618,240,781.12	928,211,000.00	33,174,808,203.86
01 Bangunan Gedung	33,484,778,422.74	618,240,781.12	928,211,000.00	33,174,808,203.86
Transaksi Bertambah				
Belanja Modal		618,240,781.12		
Transaksi Berkurang				
Penghapusan			928,211,000.00	
02 Monumen				
03 Bangunan Menara				
04 Tugu Titik Kontrol/Pasti				

Dari pencatatan mutasi barang aset tetap gedung dan bangunan tercatat penghapusan bangunan gedung terminal cargo karena alih fungsi menjadi sentra tenun yang pengelolaan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop.(rincian terlampir)

- 4). **Jalan,Irigasi dan Jaringan** . Saldo awal tahun 2022 sebesar **Rp. 11,610,089,807.40**, aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana. Pada pencatatan aset menunjukkan penambahan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yaitu mutasi aset dari Setda Kab. Jembrana Sesuai Berita acara serah terima barang No : 028/2272/BA/UMUM/2022, berupa instalasi pusat pengatur listrik lain-lain berupa meteran listrik, dari penambahan sebesar **Rp. 373,920,000.00**, sehingga untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember Tahun 2022 aset tetap jalan, jaringan dan irigasi menjadi **Rp 11,984,009,807.40**

Uraian	Akhir 2021/Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Mutasi Dari 1 Januari sd 31 Desember 2022		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
04 Jalan Irigasi dan Jaringan	11,610,089,807.40	373,920,000.00		11,984,009,807.40
01 Jalan dan Jembatan	1,558,781,000.00	-		1,558,781,000.00
02 Bangunan Air / Irigasi	3,082,264,000.00	-		3,082,264,000.00
03 Instalasi	6,969,044,807.40	373,920,000.00		7,342,964,807.40
Transaksi Bertambah				
Mutasi Masuk Antar SKPD		373,920,000.00		
01 Jaringan	-			

- 5) **Aset Tetap Lainnya** saldo awal aset tetap lainnya tahun 2022 **Rp 1,300,993,495.** merupakan aset tetap lainnya (Hewan, termak/tumbuhan berupa induk ikan Nila, Gurami, Karper, Lele) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, dimana tidak ada penambahan maupun pengurangan aset tetap lainnya Sehingga nilai aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember tahun 2022 masih berada pada posisi nilai aset tetap lainnya **Rp. 1,300,993,495.**

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Mutasi Dari 1 Januari sd 31 Desember 2022		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
05 Aset Tetap Lainnya	1,300,993,495.00	-	-	1,300,993,495.00
01 Bahan Perpustakaan	-	-	-	-
02 Barang Bercorak Kesenian	-	-	-	-
03 Hewan	-	-	-	-
04 Biota Perairan	148,800,000.00	-	-	148,800,000.00
05 Tanaman	-	-	-	-
06 Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
07 Aset Tetap Dalam Renovasi	1,152,193,495.00	-	-	1,152,193,495.00

- 6) **Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**, saldo awal tahun 2022 **Rp. 49.813.500,00.**, Nilai KDP ini merupakan catatan aset pada daftar pengadaan belanja modal aset tetap Instalasi Lampu Penerangan tahun 2020 berupa belanja Perencanaan Meterisasi PJU sesuai SPK/Perjanjian Kontrak : 027/12-perencanaanpju/HUB/DPKP/2020 tanggal 3 maret tahun 2020 dengan SP2D nomor : 931/01641/SP2D/2020 tanggal 5 april 2020, dan pada kertas kerja menunjukkan reklas dari aset tetap instalasi listrik ke KDP. Catatan aset tahun 2022 menunjukkan tidak ada bertambah dan berkurang nilai KDP, sehingga saldo akhir tahun 2022 masih pada posisi nilai sebesar **Rp. 49.813.500,00.**

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Mutasi Dari 1 Januari sd 31 Desember 2022		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
06 Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,813,500.00			49,813,500.00
01 Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,813,500.00			49,813,500.00

6. **Akumulasi Penyusutan** saldo awal tahun 2022 **Rp. 22,531,039,931.00**, terjadi penambahan sebesar Rp. 1,924,177,511 terdiri dari akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin (754,635,883), akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan bertambah sebesar (652,435,122), akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari Mutasi Masuk Antar SKPD sebesar (494,062,636), akumulasi penyusutan aset tetap lainnya bertambah sebesar (23.043.870), dan pengurangan karena penghapusan bangunan gedung dinilai sebesar (185,084,485). Nilai Akumulasi Penyusutan pada periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 24,270,132,957**, dengan perhitungan catatan aset berikut ini :

Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Mutasi Dari 1 Januari sd 31 Desember 2022		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
B AKUMULASI PENYUSUTAN				
07 Akumulasi Penyusutan	22,531,039,931.00	1,924,177,511.00	185,084,485.00	24,270,132,957.00
01 AP - Peralatan dan Mesin	10,854,945,437.00	754,635,883.00		11,609,581,320.00
Transaksi Bertambah				
Beban Penyusutan		754,635,883.00		
02 AP - Gedung dan Bangunan	6,261,910,402.00	652,435,122.00	185,084,485.00	6,729,261,039.00
Transaksi Bertambah				
Beban Penyusutan		652,435,122.00		
Transaksi Berkurang				
Penghapusan			185,084,485.00	
03 AP - Jalan Irigasi dan Jaringan	5,245,349,453.00	494,062,636.00		5,739,412,089.00
Transaksi Bertambah				
Beban Penyusutan		413,046,633.00		
Mutasi Masuk Antar SKPD		81,016,003.00		
04 AP - Aset Tetap Lainnya	168,834,639.00	23,043,870.00		191,878,509.00
Transaksi Bertambah				
Beban Penyusutan		23,043,870.00		

7. Aset Lainnya

Catatan aset menunjukkan saldo awal 2022 Aset lainnya sebesar **Rp. 1.121.101.476,00** dengan **perhitungan : terjadi pengurangan sebesar (18.168.600)** yaitu penyusutan Aset tidak berwujud berupa kajian zonasi kawasan taman pesisir jembrana. Sedangkan catatan mutasi dari 1 Januari sd 31 Desember 2022 terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar **1.052.260.000,00**, Aset Tidak Berwujud **396.250.000,00** bertambah dari belanja modal **Rp 16,935,000.00**, Aset Lain lain **977.182.876,00**, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **(252.331.400,00)** bertambah sebesar **18,168,600.00** dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya **(1.052.260.000,00)**. dengan perhitungan mutasi sebagai berikut:

REKAP PER JENIS TRANSAKSI ASET LAINNYA
DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Per 31 DESEMBER 2022

No	GOLONGAN BARANG MILIK DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG					SALDO AKHIR
			BEBAN PENYUSUTAN	Belanja Modal	Reklas Dari Aset Tetap	Baru Catat	Reklas Kelompok Aset	Koreksi	SUBTOTAL	Penghapusan	Reklas ke Aset Tetap	Mutasi ke SKPD Lain	Reklas Kelompok Aset	Koreksi	
	ASET LAINNYA	1,121,101,476.00	-	16,935,000.00	-	-	-	-	(1,233,600.00)	-	-	-	-	-	1,119,867,876.00
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	396,250,000.00	-	16,935,000.00	-	-	-	-	16,935,000.00	-	-	-	-	-	413,185,000.00
	Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hak Cipta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hak Paten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Software	125,750,000.00	-	16,935,000.00	-	-	-	-	16,935,000.00	-	-	-	-	-	142,685,000.00
	Kajian	270,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,500,000.00
	Film	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karya Seni/Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pengerjaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Aset Lain-Lain	3,197,328,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,197,328,600.00
	Aset Rusak Berat	2,145,068,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145,068,600.00
	Tanah Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	860,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,140,000.00
	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	1,284,928,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,284,928,600.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1,052,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052,260,000.00
	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,052,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052,260,000.00
	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset yang akan diserahkan/dihibahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tanah yang akan diserahkan/dihibahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan/dihibahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan/dihibahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Jalan Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan/dihibahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya yang akan diserahkan/dihibahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL HARGA PEROLEHAN	3,593,578,600.00	16,935,000.00	-	-	-	-	16,935,000.00	-	-	-	-	-	-	3,610,513,600.00
	Akumulasi Penyusutan ATB	252,331,400.00	18,168,600.00	-	-	-	-	18,168,600.00	-	-	-	-	-	-	270,500,000.00
	Akumulasi Amortisasi Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Amortisasi Hak Paten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Amortisasi Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Amortisasi Kajian	252,331,400.00	18,168,600.00	-	-	-	-	18,168,600.00	-	-	-	-	-	-	270,500,000.00
	Akumulasi Amortisasi Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Pemanfaatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan ALL	2,220,145,724.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220,145,724.00
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	1,167,885,724.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,885,724.00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,052,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,052,260,000.00

	Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan/dihibahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENYUSUTAN	2,472,477,124.00		-	-	-	-	-	18,168,600.00	-	-	-	-	-	2,490,645,724.00
	TOTAL NILAI BUKU														1,119,867,876.00

4.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per tanggal 31 Desember Tahun 2022 adalah **Rp. 00**

4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per tanggal 31 Desember Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. 64.509.181.613,90**, Sedangkan Ekuitas di 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 68.438.681.369,11**. Penurunan saldo ekuitas disebabkan adanya penurunan saldo kewajiban yang dikonsolidasikan terdiri dari pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dan Belanja serta adanya koreksi ekuitas aset tetap.

4.3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan perhitungan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan operasional pada tahun pelaporan berupa Surplus/Defisit Operasional, Dampak Kumulatif Perubahan/Kesalahan Mendasar, dan pemenuhan dana yang diperoleh dari rekening PPKD selaku BUD. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp 68.438.681.367,61 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021
- 2) Surplus/defisit LO sebesar (Rp 18.345.223.834,88) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana tahun 2022
- 3) Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:
Koreksi Ekuitas Rp (4.154.291.000,00)
- 4) Kewajiban untuk dikonsolidasikan merupakan pemenuhan dana selama tahun anggaran 2022 yang diperoleh dari pendapatan yang dikelola Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dan pemenuhan belanja dari rekening PPKD sebesar Rp 18.570.015.081,17

- 5) Ekuitas Akhir sebesar Rp 64.509.181.613,90 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk periode yang berakhir sampai 31 Desember 2022.

4.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

1. Aset Lancar

Total Aset lancar pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per tanggal 31 Desember tahun 2022 **Rp. 1.525.301.112,62**, terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan : 00, Kas di Bendahara Pengeluaran : 00, Piutang Retribusi Daerah : 1.569.877.067,00, Penyisihan Piutang : (310.709.898,38), Persediaan : 266.133.944,00

2. Aset Tetap

Total Aset tetap pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per tanggal 31 Desember Tahun 2022 **Rp. 61.864.012.625,78**, dengan rincian berupa Tanah ; 26.230.591.318,44, Peralatan dan Mesin : 13.393.929.258,08, Gedung dan Bangunan : 33.174.808.203,8, Jalan, Jaringan, dan Irigasi : 11.984.009.807,40, Aset Tetap Lainnya : 1.300.993.495,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan : 49.813.500,00, Akumulasi Penyusutan : (24.270.132.957,00)

3. Aset Lainnya

Total Aset lainnya pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per tanggal 31 Desember Tahun 2022 **Rp. 1.119.867.876,00**

4. Kewajiban

Total Kewajiban pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per tanggal 31 Desember Tahun 2022 **Rp.00**

5. Ekuitas

Total Ekuitas pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana per tanggal 31 Desember Tahun 2022 **Rp. 64.509.181.613,90**. *Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam lampiran Laporan Perubahan Ekuitas.*

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Mengawali tahun 2017 dibentuk Organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana yang sebelumnya nomenklaturnya namanya Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, dengan 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas yang membawahi Kasubag Umum dan Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan serta 3 Bidang dengan masing-masing 3 kepala seksi.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehubungan dengan Keputusan tersebut maka per tanggal 1 Agustus tahun 2017 PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan ditetapkan menjadi PNS Pusat.
3. Pada Bulan Desember Tahun 2017 adalah awal percobaan mengaplikasikan pemberlakuan kebijakan akuntansi keuangan berupa transaksi non tunai. Hal ini diperlukan pemberdayaan SDM dan peningkatan pemahaman yang memadai melalui penyelenggaraan baik bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan terkait kebijakan akuntansi sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Tahun Anggaran 2019 pada bulan September penerapan implementasi SIMDA Integrated, dimana penerapan SIMDA Integrated adalah untuk menyediakan Data Base mengenai kondisi di daerah yang terpadu, baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian / aparatur daerah, maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah serta merupakan suatu aplikasi yang sangat komprehensif dan bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja. Aplikasi SIMDA Integrated ini dibangun untuk dapat mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran atau database terintegrasi, dengan menggunakan satu data terintegrasi yang dapat menghasilkan DPA, LKPD dan LAKIP serta dapat digunakan untuk Sistem Keuangan, Anggaran,

Monev dan SAKIP. Adanya SIMDA Integrated ini diharapkan konsistensi antara rencana yang telah disusun dan ditetapkan melalui dokumen RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD dapat dipantau dan dievaluasi dengan lebih tepat dan akurat dalam rangka pengendalian dan pencapaian target kinerja pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021.

BAB VI

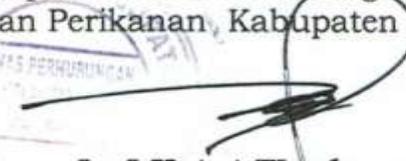
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau daftar rincian atau analisis dari angka/nilai suatu pos yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, melalui Laporan Keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel.

Negara 31 Desember 2022

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan
dan Perikanan, Kabupaten Jembrana,



Ir. I Ketut Wardananaya
Pembina Tk I
NIP. 19651229 199203 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 2-15.3-25.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit : 2-15.3-25.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit : 2-15.3-25.0-00.01.000.0 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	68.438.681.367,61	65.681.624.945,07
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.345.223.834,88)	(19.703.402.490,23)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(4.154.291.000,00)	2.604.182.614,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	18.570.015.081,17	19.856.276.298,77
EKUITAS AKHIR	64.509.181.613,90	68.438.681.367,61

Negeri, 31 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

 Ir. I Ketut Hartanto Nana
 NIP. 19651229192031011





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 2-15.3-25.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit : 2-15.3-25.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit : 2-15.3-25.0-00.01.000.0 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Putang Retribusi	1.569.877.067,00	1.211.241.315,50
Penyisihan Putang	(310.709.898,38)	(842.425.238,05)
Perediaan	266.133.944,00	104.204.044,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.525.301.112,62	473.020.121,45
ASET TETAP		
Tanah	26.230.591.318,44	29.830.591.318,44
Peralatan dan Mesin	13.393.929.258,08	13.089.333.158,08
Gedung dan Bangunan	33.174.808.203,86	33.484.778.422,74
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.984.009.807,40	11.610.089.807,40
Aset Tetap Lainnya	1.300.993.495,00	1.300.993.495,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.813.500,00	49.813.500,00
Akumulasi Penyusutan	(24.270.132.957,00)	(22.531.039.931,00)
JUMLAH ASET TETAP	61.894.012.625,78	68.844.559.770,66
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	413.185.000,00	396.250.000,00
Aset Lain-lain	977.182.876,00	977.182.876,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(270.500.000,00)	(252.331.406,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	1.119.867.876,00	1.121.101.470,00
JUMLAH ASET	64.509.181.614,40	68.438.681.368,11
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	64.509.181.613,90	68.438.681.367,61
JUMLAH EKUITAS	64.509.181.613,90	68.438.681.367,61
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	64.509.181.613,90	68.438.681.367,61

Negara, 31 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN



 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021</p>					
Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN SKPD : 2-15.3-25.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 2-15.3-25.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 2-15.3-25.0-00.01.000.000 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN	10.861.000.000,00	5.891.576.250,50	54,25	5.512.755.312,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.861.000.000,00	5.891.576.250,50	54,25	5.512.755.312,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	10.811.000.000,00	5.793.343.691,50	53,58	5.451.688.268,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	98.232.559,00	196,67	61.145.044,00
5	BELANJA	26.832.956.031,00	24.481.891.301,67	91,16	25.369.001.810,77
5.1	BELANJA OPERASI	25.883.303.031,00	23.531.919.450,55	90,92	23.182.114.321,89
5.1.01	Belanja Pegawai	6.517.516.893,00	5.877.178.028,00	90,18	5.906.082.908,11
5.1.02	Belanja Barang	16.865.737.319,00	15.921.948.168,29	94,40	15.011.557.113,01
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.450.049.019,00	1.702.793.242,26	69,50	2.364.594.600,77
5.2	BELANJA MODAL	949.653.000,00	929.771.281,12	97,91	2.186.917.289,88
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	306.488.000,00	294.596.100,00	96,04	1.821.507.314,08
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	632.000.000,00	618.240.781,12	97,82	0,00
5.2.04	Belanja Jalan, Kipal dan Jaringan	0,00	0,00	0	365.488.974,80
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	17.165.000,00	16.936.000,00	98,66	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(15.971.956.031,00)	(18.578.015.081,17)	0	(19.856.276.288,77)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(15.971.956.031,00)	(18.578.015.081,17)	0	(19.856.276.288,77)

Nagara, 31 Desember 2022

PENGUNA ANGGARAN



Ir. Ketut Wardana Naya
NIP. 19651229199231011

		PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN OPERASIONAL		Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021	
Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN SKPD : 2.15.3-25.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 2.15.3-25.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 2.15.3-25.0-00.01.000.000 DINAS PERHUBUNGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	6.250.312.002,00	5.432.749.584,00	817.562.418,00	15,05
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.250.312.002,00	5.432.749.584,00	817.562.418,00	15,05
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	6.151.979.443,00	5.371.603.540,00	780.375.903,00	14,53
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.332.559,00	61.146.044,00	37.186.515,00	60,82
09	BEBAN	24.595.535.836,88	25.136.152.074,23	(540.616.237,35)	-2,15
09.01.00	Beban Pegawai	5.877.178.020,00	5.805.002.808,11	71.175.411,89	1,23
09.02.00	Beban Persediaan	1.354.737.468,00	1.241.740.120,00	112.997.348,00	9,10
09.03.00	Beban Jasa	12.636.534.921,00	12.034.810.555,34	601.724.365,66	5,00
09.04.00	Beban Pemeliharaan	1.576.803.061,29	1.822.897.137,67	(246.094.076,38)	-15,50
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	191.942.838,00	55.953.000,00	134.989.838,00	237,02
09.06.00	Beban Hibah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0
09.09.00	Beban Bantuan Sosial	1.702.793.242,26	2.364.554.600,77	(661.761.358,51)	-27,99
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	-531.715.339,67	109.889.716,34	(641.605.056,01)	-593,86
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.757.261.625,00	1.699.304.394,00	57.957.231,00	3,41
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(18.345.223.834,88)	(19.703.402.490,23)	1.358.178.655,35	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.345.223.834,88)	(19.703.402.490,23)	1.358.178.655,35	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.345.223.834,88)	(19.703.402.490,23)	1.358.178.655,35	0

Negara, 31 Desember 2022

PENGUNA ANGGARAN





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JALAN MAYOR SUGIANYAR NO. 19, Telp. (0365) 45455120
N E G A R A

**Berita Acara Rekonsiliasi Konsolidasi Aset Tetap
Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan
Per 31 Desember 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal sebetas bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang Rapat BPKAD, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : I Gede Widiansana, SH
NIP : 19670814 198602 1 002
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab penyusunan Laporan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan
- II. Nama : I Nyoman Agus Pradnyana, ST
NIP : 19771130 201001 1 009
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang Pengelola
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab penyusunan Laporan Aset Tetap Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Jemberana

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Aset Tetap pada lingkup Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan dengan cara membandingkan saldo akhir Aset Tetap pada Sinda BMD dengan Laporan Aset Tetap Konsolidasi untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data :

No	Golongan Barang Milik Daerah	Sinda BMD Konsolidasi (Rp)	Sinda BMD SKPD (Rp)	Selisih	Keterangan
A	ASET TETAP				
1	Tanah				
1.01.	Tanah	26.230.591.318,44	26.230.591.318,44	-	
2	Peralatan dan Mesin				
2.01.	Alat Besar	409.733.500,00	409.733.500,00	-	
2.02.	Alat Angkutan	4.032.679.000,00	4.032.679.000,00	-	
2.03.	Alat Bengkel Dan/At Ukur	2.162.789.814,08	2.162.789.814,08	-	
2.04.	Alat Perbaikan	21.200.000,00	21.200.000,00	-	
2.05.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.073.440.196,00	2.073.440.196,00	-	
2.06.	Alat Studi, Komunikasi Dan Per	239.173.500,00	239.173.500,00	-	
2.07.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-	-	
2.08.	Alat Laboratorium	31.600.000,00	31.600.000,00	-	
2.09.	Alat Persenjataan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
2.10.	Komputer	898.640.748,00	898.640.748,00	-	
2.11.	Alat Eksplorasi	-	-	-	
2.12.	Alat Pengeboran	-	-	-	
2.13.	Alat Produksi, Pengolahan Dan P	-	-	-	
2.14.	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	
2.15.	Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	
2.16.	Alat Peraga	-	-	-	
2.17.	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	
2.18.	Rambu - Rambu	3.514.172.500,00	3.514.172.500,00	-	
2.19.	Peralatan Olah Raga	-	-	-	
3	Gedung dan Bangunan				
3.01.	Bangunan Gedung	33.174.808.203,86	33.174.808.203,86	-	
3.02.	Monumen	-	-	-	
3.03.	Bangunan Menara	-	-	-	
3.04.	Tugu Tihk KontrolPassi	-	-	-	

No	Golongan Barang Milik Daerah	Simda BMD Konsolidasi (Rp)	Simda BMD SKPD (Rp)	Selisih	Keterangan
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
4.01	Jalan Dan Jembatan	1.558.781.000,00	1.558.781.000,00	-	
4.02	Bangunan Air	3.082.264.000,00	3.082.264.000,00	-	
4.03	Instalasi	7.342.964.807,40	7.342.964.807,40	-	
4.04	Jaringan	-	-	-	
5	Aset Tetap Lainnya				
5.01	Bahan Perpustakaan	-	-	-	
5.02	Barang Berporak Keserian/Kebudayaan	-	-	-	
5.03	Hewan	-	-	-	
5.04	Biota Perairan	148.800.000,00	148.800.000,00	-	
5.05	Tanaman	-	-	-	
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	
5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.152.193.495,00	1.152.193.495,00	-	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.813.500,00	49.813.500,00	-	
TOTAL		86.134.145.582,78	86.134.145.582,78	-	
B AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP					
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
7.01	AP - Peralatan dan Mesin	11.609.581.320,00	11.609.581.320,00	-	
7.02	AP - Gedung dan Bangunan	6.729.261.039,00	6.729.261.039,00	-	
7.03	AP- Jalan Irigasi dan Jaringan	5.739.412.089,00	5.739.412.089,00	-	
7.04	AP - Aset Tetap Lainnya	191.878.509,00	191.878.509,00	-	
C ASET EKSTRAKOMPABLE					
1	Aset Ekstrakomptable	1.234.694.054,00	1.234.694.054,00	-	

Rincian terlampir

II. Perbedaan yang masih ditemukan disajikan dalam Lampiran berita acara ini, dan akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak.

III. Hal-hal penting lainnya terkait penyusunan Laporan Barang disajikan dalam Lampiran berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Jemberana. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas Berita Acara ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna
Dinas PKP



I Gede Widarsana, SH
Nip. 19670814 198602 1 002

Kasubid Penatausahaan

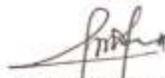
BMD



I Nyoman Agus Pradnyana, ST
Nip. 19771130 201001 1 009

Mengetahui

Kepala Bidang Aset
BPKAD



Ni Made Arding, S.Sos
Nip. 19681121 198503 2 005

JENIS BARANG	Saldo Awal Per 1 Januari 2022		Mutasi Dari 1 Januari s.d 31 Desember 2022				Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	
	Jml	Harga	Bertambah		Berkurang		Jml	Harga
			Jml	Harga	Jml	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 - Bangun Kabin dan Bangsya	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - Aset Tetap Dalam Perbaikan	5	1.151.193.400,00	-	-	-	-	5	1.151.193.400,00
08 - Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	49.813.500,00	-	-	-	-	1	49.813.500,00
01 - Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	49.813.500,00	-	-	-	-	1	49.813.500,00
	1.500	80.279.309.791,66	118	1.408.924.881,57	41	4.881.979.000,00	1.587	86.134.145.582,78
B AKUMULASI PENYUSUTAN								
01 - Akumulasi Penyusutan		32.531.638.921,88		1.824.177.811,60		185.884.485,00		34.278.132.907,00
01 - AP - Perbaikan dan Meron		10.854.343.437,00		754.839.882,00		-		11.609.183.320,00
Transaksi Bertambah								
Saldo Penyusutan				754.839.882,00				
01 - AP - Gedung dan Bangunan		6.781.870.482,00		610.436.122,00		185.884.485,00		6.779.961.205,00
Transaksi Bertambah								
Saldo Penyusutan				610.436.122,00		185.884.485,00		
Penghapusan								
01 - AP - Jalin Nyalai dan Jaringan		5.245.345.443,00		454.062.838,00		-		5.739.412.989,00
Transaksi Bertambah								
Saldo Penyusutan				454.062.838,00				
Mutasi Masuk Antar SAPD				413.048.933,00				
04 - AP - Aset Tetap Lainnya		168.834.600,00		23.043.870,00		-		191.878.504,00
Transaksi Bertambah								
Saldo Penyusutan				23.043.870,00				
C ASET TETAP EKSTRAKOMPATIBEL								
01 - Aset Ekstrakompatabel	1.887	1.296.980.854,00	-	-	2	31.360.000,00	1.887	1.234.894.854,00
01 - Aset Ekstrakompatabel	1.887	1.296.980.854,00	-	-	2	31.360.000,00	1.887	1.234.894.854,00
Transaksi Bertambah								
Penghapusan					2	31.360.000,00		

DAFTAR ASET BELUM TERSERTIFIKASI
SGPD Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan

No	Nama		Spesifikasi Barang				Perolehan		Keterangan	
	Kode Barang	Reguler	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Status Barang	Jml		Harga
Tanah Belian Bersertifikat										
1	1.01.01.04.001	0001	Tanah Bangunan Kantor Pem. J. Meyer Suganjar		Pembelian	2006	5450	1	976.000.000,00	Kantor Dinas PNP, UHKP dan
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
			Sub Total					1	976.000.000,00	
Kendaraan Tanpa BPKB										
1	2.02.01.02.003	0002	Min Bus (Panamping 14 Ors	Isuzu / Panther Minibus	Pembelian	1997		1	66.000.000,00	Dinas PNP
2	2.02.01.04.001	0008	Sepeda Motor	Suzuki Thruster	Pembelian	2006		1	10.400.000,00	Dinas PNP
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
			Sub Total					2	76.400.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Mayor Sugianyar, No. 9 Negara

**BERITA ACARA INVENTARISASI (STOCK OPNAME)
BARANG PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. I KETUT WARDANA NAYA
NIP : 19651229 199203 1 011
Jabatan : Pengguna Barang
2. Nama : Ni Putu Sukeni
NIP : 19751231 200701 2 091
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

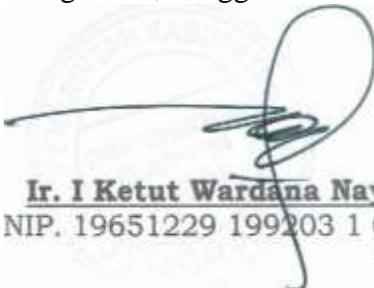
Menyatakan bahwa telah melakukan stock opname barang persediaan PER 31 DESEMBER 2022, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Berita Acara Opname Fisik (Stock Opname), adapun total Nilai Barang per jenis barang, meliputi :

NO.	KODE BARANG	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH PERSEDIAAN PERTANGGAL PERHITUNGAN		KETERANGAN
			JUMLAH	TOTAL HARGA	
1	2	3	4	5	6
	1.1.7.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK		266.133.944,00	
	1.1.7.01.03.01	ALAT TULIS KANTOR		68.706.400,00	
	1.1.7.01.03.02	KERTAS DAN COVER		93.900,00	
	1.1.7.01.03.03	BAHAN CETAK		191.022.944,00	
	1.1.7.01.03.04	BENDA POS		950.000,00	
	1.1.7.01.03.06	BAHAN KOMPUTER		1.719.000,00	
	1.1.7.01.03.08	ALAT LISTRIK		2.842.700,00	
	1.1.7.01.03.13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR		799.000,00	
		TOTAL		266.133.944,00	

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pengguna Barang


Ir. I Ketut Wardana Naya
NIP. 19651229 199203 1 011

Jembrana, 02 Januari 2023

Pengurus Barang Pengguna



Ni Putu Sukeni

NIP. 19751231 200701 2 091